

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN: PERAN KOMITE SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Ivan Hanafi dan Mufti Ma'sum
Universitas Negeri Jakarta
email: ivan.hanafi@gmail.com

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dan menelaah peran, fungsi, dan tugas komite sekolah terhadap komponen *input*, proses, dan *output* pada SMK di Jakarta. Metode yang digunakan adalah survei dengan populasi SMK di Jakarta dan sampel diambil secara *purposive stratified*. Pengumpulan data dilakukan lewat studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan peran komite sekolah masih cukup tinggi, kecuali peran pengawasan (*controlling*) dan mediasi antara sekolah dengan dunia kerja dan industri (*mediating*) yang relatif rendah. Padahal, peran *mediating* justru sangat dibutuhkan oleh SMK sebagai institusi pendidikan yang memiliki karakteristik khusus, yakni menyiapkan peserta didik terjun ke lapangan kerja. Untuk itu, perlu dilakukan upaya mendorong agar komite sekolah SMK memiliki kapasitas untuk menjadi mediator yang baik antara sekolah dengan dunia kerja dan industri agar SMK dapat menyiapkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang senantiasa berubah dinamis.

Kata Kunci: *implementasi, kebijakan pendidikan, komite sekolah, sekolah menengah kejuruan*

AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL POLICY: ROLE OF THE SCHOOL COMMITTEE IN THE VOCATIONAL HIGH SCHOOLS

Abstrak: The study was aimed to analyze the implementation of the educational policy and to examine the role, functions and duties of the School Committee to the input, process and output components in the vocational high schools in Jakarta. This study used a survey method with the population of all vocational high schools in Jakarta and the sample was taken using the purposive stratified sampling technique. The data were collected using documents and interviews. All the data were analyzed descriptively. The findings showed that as a whole the school committee has high roles, except in the controlling role. The school committee had a low role in mediating the schools and industries. Yet, the mediating role was very much needed by vocational high schools which had specific characteristics, that is, preparing students to work. Therefore, the school committee should be encouraged to have the capacity to mediate the schools and the industries so that the schools could produce high quality graduates in response to the dynamic demand of the industries.

Keywords: *implementation, educational policy, school committee, vocational high schools*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah mengemban tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah Indonesia telah membuat landasan hukum pendidikan, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang memberikan

dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 adalah mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tu-

han Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Amanat yang terkandung dalam UUSPN memberi makna bahwa bangsa Indonesia meyakini pendidikan merupakan wahana untuk membangun bangsa yang berbudaya dan bermartabat, serta dapat membekali warga masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi *global competitiveness*.

Sejalan dengan itu, pasal 56 UUSPN memberi ruang kepada elemen masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan, baik pada tingkat kabupaten/kota maupun pada satuan pendidikan. Peran masyarakat, khususnya dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan dapat dilakukan melalui wadah dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat keputusan tentang kedua hal itu, yakni Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. SK tersebut merupakan salah satu payung hukum yang kuat sebagai upaya untuk mewujudkan usaha pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di masing-masing daerah dan sekolah. Hal itu didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Persoalan yang muncul dalam perjalanan pembentukan dan pelaksanaan dewan pendidikan dan komite sekolah selama kurun waktu lebih dari sepuluh tahun adalah terkait dengan keberadaan, keikutsertaan dalam menangani persoalan pendidikan di daerah dan sekolah, serta kendala yang dihadapi untuk melaksanakan kegiatan pada dinas pendidikan atau sekolah. Apakah dewan pendidikan dan komite sekolah telah

memberi kontribusi yang signifikan terhadap layanan dan peningkatan mutu pendidikan seperti yang diamanatkan perundang-undangan?

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Depdiknas, 2004). Komite sekolah (KS) memegang peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan karena segala kegiatan yang berlangsung di sekolah seyogyanya selalu melibatkan dan didampingi komite sekolah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sekolah, mulai sekolah dasar hingga menengah menunjukkan bahwa peran dan fungsi komite sekolah belum maksimal, bahkan belum sesuai dengan yang termaktub dalam Kepmendiknas tersebut. Hal ini terlihat tidak hanya dalam menjalankan perannya, tetapi juga dalam proses pembentukannya.

Pada umumnya, sekolah mengambil cara sederhana dan praktis dalam membentuk kepengurusan, yakni dengan mengundang beberapa wakil dari orang tua murid yang menurut sekolah dapat membantu memajukan sekolah. Lebih lanjut, pembentukan komite sekolah dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan dalam perolehan bantuan dana dari pemerintah kabupaten/kota serta sebagai persyaratan dalam penilaian/evaluasi sekolah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Padahal setiap kebijakan, termasuk pembentukan komite sekolah harus mengedepankan kepentingan *stakeholders*, terutama untuk kepentingan peserta didik (Semiawan, 2007:199).

Dalam mengevaluasi dan mendesain kurikulum yang semestinya, komite sekolah juga dilibatkan. Pada kenyataannya, hal tersebut hanya dilakukan oleh pihak sekolah, sedangkan komite sekolah hanya menyetujui saja. Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Lestari (2012) yang menyebutkan bahwa: (1) komite sekolah dijadikan sebagai alat legalitas dalam menarik iuran yang dibebankan kepada wali murid; (2) komite sekolah cenderung didikte

oleh pihak sekolah dalam pengelolaan keuangan; dan (3) musyawarah hanya dilakukan antara sekolah dan ketua komite sekolah saja, tanpa melibatkan anggota komite lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sejauhmana peran, fungsi, dan tugas komite sekolah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang bermutu di Sekolah Menengah Kejuruan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah survei dan wawancara mendalam serta melakukan analisis dokumen terhadap implementasi kebijakan terkait dengan program dan pelaksanaan komite sekolah pada sejumlah sekolah yang menjadi objek penelitian. Analisis didasarkan pada hasil survei tentang peran dan fungsi komite sekolah yang disandarkan kepada pendekatan sistem (*input*, proses, dan *output*) persekolahan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sandaran teori yang relevan dengan mengevaluasi setiap komponen sistem (*input*, proses, *output*) terhadap pelaksanaan program atau kelembagaan. Penelitian ini dilakukan pada SMK di wilayah DKI Jakarta selama kurun waktu empat bulan, dimulai dari September hingga Desember 2012. Di samping itu, pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan data yang diharapkan.

Sejumlah SMK sebagai sampel penelitian rintisan dipilih untuk mendapatkan data terkait dengan aktivitas komite sekolah. Kajian berkaitan dengan peran, fungsi, dan tugas komite sekolah merupakan telaah yang ingin mendapatkan gambaran tentang berbagai kegiatan yang dilakukan komite sekolah dan menganalisis kesesuaiannya dengan amanat peraturan perundang-undangan. Instrumen penelitian dikembangkan berdasarkan kisi-kisi instrumen yang merujuk pada peran dan fungsi komite sekolah, yakni memberi pertimbangan kebijakan sekolah (*advisory*), memberi dukungan penyelenggaraan pendidikan bermutu (*supporting*), mengontrol pengelolaan sekolah (*controlling*), dan menjembatani kerjasama seko-

lah, pemerintah, dan masyarakat (*mediating*). Untuk mendapatkan gambaran awal tentang pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas komite sekolah, dilakukan pemilihan sampling data dengan *purposive stratified sampling*. Sekolah dibagi berdasarkan pengelolaan, negeri dan swasta, serta jenis dan bidang ilmu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMK yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri atas SMK Negeri dan Swasta bidang studi Teknologi dan SMK Negeri dan Swasta bidang studi Bisnis dan Manajemen. Berdasarkan data yang dikumpulkan, keberadaan Komite sekolah masih tinggi dan melakukan berbagai aktivitas yang diperlukan oleh sekolah (92%), sedangkan Komite sekolah yang tidak aktif relatif rendah (8%). Komite sekolah yang tidak aktif didapatkan dari SMK Negeri dan bidang studi Teknologi. Pada umumnya, komite sekolah yang aktif senantiasa mendampingi sekolah dalam berbagai kegiatan sekolah, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Namun demikian, tidak seluruh peran komite sekolah dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Peran Komite Sekolah SMK terhadap komponen sistem (*input*, proses, *output*) menggambarkan kecenderungan peran komite sekolah. Hal itu dapat menggambarkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama mutu lulusannya. Dalam konteks ini, MBS memberikan peluang otonomi, fleksibilitas dan tanggung jawab, serta perencanaan kegiatan sekolah oleh Kepala Sekolah dan masyarakat (Bolam, 1993: 223).

Berdasarkan hasil penelitian, peran komite sekolah dalam memberi pertimbangan untuk kebijakan sekolah (*advisory*) terhadap input rata-rata sebesar 80%, terhadap proses rata-rata sebesar 77%, dan terhadap output rata-rata sebesar 75%. Peran komite sekolah dalam memberi dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu (*supporting*) terhadap input rata-rata sebesar 82%, terhadap proses rata-rata sebesar 77%, dan terhadap output rata-rata sebesar 80%. Peran komite sekolah dalam mengon-

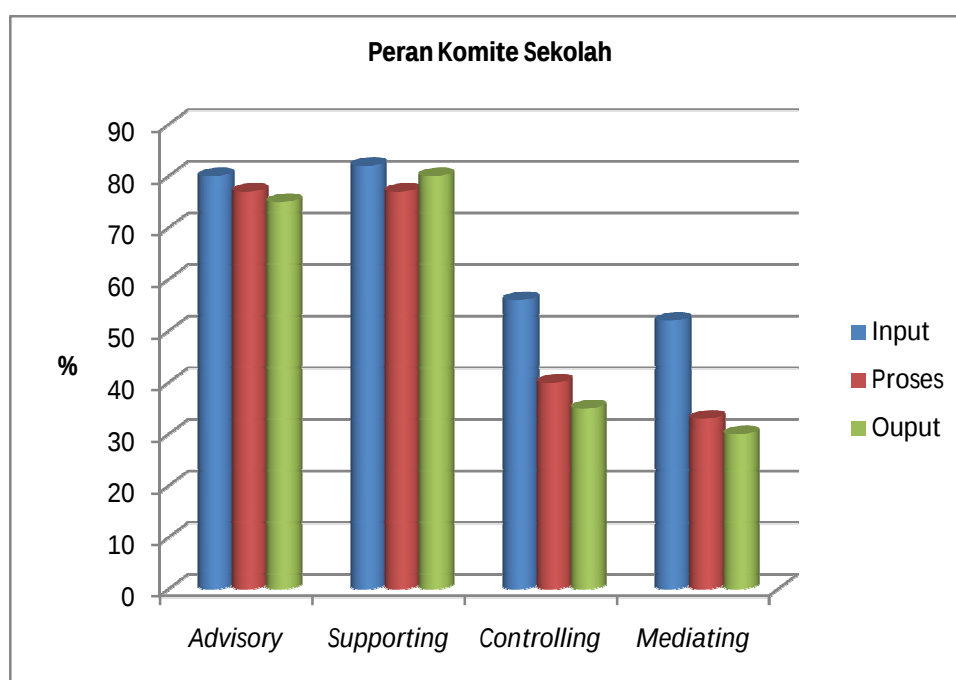
trol penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah (*controlling*) terhadap input rata-rata sebesar 56%, terhadap proses rata-rata sebesar 40%, dan terhadap *output* rata-rata sebesar 35%. Peran komite sekolah dalam menjembatani kerjasama sekolah, pemerintah, dan masyarakat atau dunia kerja dan industri (*mediating*) terhadap input rerata sebesar 52%, terhadap proses sebesar 33%, dan terhadap *output* sebesar 30%, seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

Peran Advisory Komite Sekolah

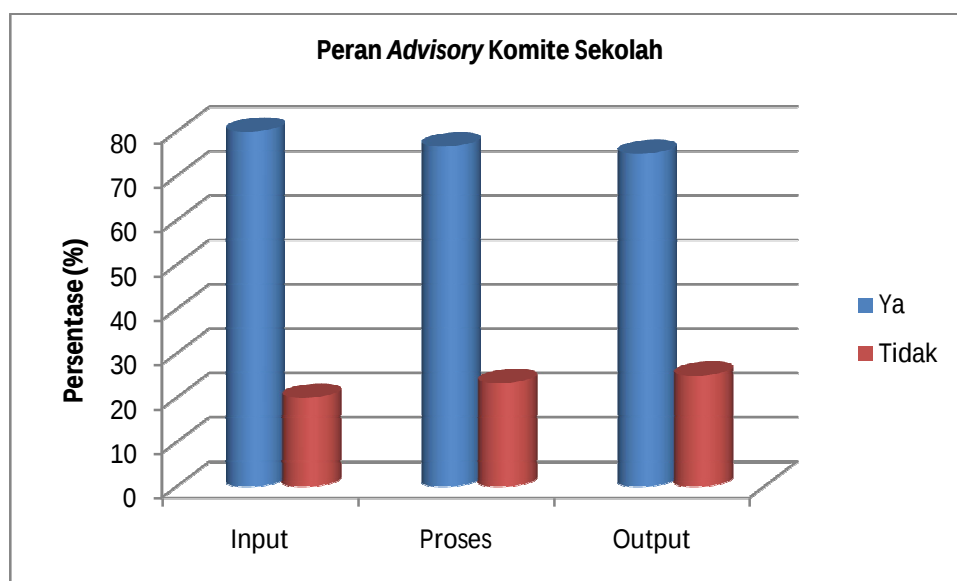
Dalam konteks sekolah sebagai sebuah sistem, komponen sistem terdiri atas *input*, proses, dan *output*. Rerata peran *advisory* komite sekolah terhadap komponen sistem (*input*, proses, *output*) ditunjukkan pada Gambar 2. Komponen *input* yang terdiri atas kurikulum, sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa), program kesiswaan, sarana dan prasarana untuk aktivitas pembelajaran di dalam dan di luar kelas, serta keuangan sekolah. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) sangat penting untuk membangun pendidikan bermutu. Berdasarkan data yang dianalisis, sumbangan komite sekolah untuk memberi pertimbangan terhadap kurikulum mencapai 90%, sementara untuk sumber

daya manusia 80%, program kesiswaan 80%, sarana dan prasarana 70%, dan keuangan sekolah 80%. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan komite sekolah tidak hanya berkaitan dengan soal teknis seperti penarikan uang dari orang tua siswa seperti yang diduga selama ini, tetapi juga menunjukkan komitmen komite sekolah untuk memajukan pendidikan melalui kontribusi yang besar dalam komponen *input*.

Peran pemberi nasihat atau pertimbangan (*advisory agency*) terhadap komponen proses masih cukup tinggi, yakni kegiatan intrakurikuler (pembelajaran) sebesar 80%, kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan minat dan bakat siswa, seperti olah raga dan seni mencapai 70%, dan bimbingan kerohanian 80%. Keikutsertaan komite sekolah dalam menunjang program dan kegiatan proses pembelajaran dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Keikutsertaan komite sekolah secara langsung berupa bimbingan dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan kesiswaan, seperti olahraga dan kesenian yang diselenggarakan oleh sekolah. Peran secara tidak langsung berupa sumbangan komite sekolah untuk memberi saran dan pertimbangan dalam rangka pengembangan guru dan karyawan sekolah.



Gambar 1. Peran Komite Sekolah SMK terhadap Komponen Sistem



Gambar 2. Peran Advisory Komite Sekolah SMK terhadap Komponen Sistem

Peran pertimbangan komite sekolah terhadap komponen output menunjukkan proporsi yang cukup besar, yakni untuk prestasi akademi mencapai 80%, sedangkan untuk prestasi non-akademik 70%. Prestasi akademik ditunjukkan dari hasil ujian akhir sekolah atau ujian nasional atau prestasi akademik lainnya, seperti olimpiade bidang studi tingkat lokal dan nasional. Sementara itu, prestasi nonakademik lebih cenderung kepada prestasi bakat dan minat siswa dalam berbagai lomba, baik olahraga, kesenian maupun kegiatan lain yang diminati oleh siswa.

Peran Supporting Komite Sekolah

Peran sebagai pendukung (*supporting agency*) komite sekolah dilaksanakan dalam bentuk bantuan finansial, pemikiran, ataupun tenaga yang dapat disumbangkan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Rerata peran *supporting* komite sekolah SMK terhadap komponen sistem ditunjukkan pada Gambar 3. Dukungan komite sekolah terhadap komponen *input* dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan sekolah. Berdasarkan analisis data, sekolah yang mendapat dukungan komite sekolah terhadap komponen kurikulum cukup tinggi (90%), sumberdaya manusia (80%), program kesiswaan (90%), sarana dan prasarana (80%), dan terhadap keuangan sekolah (70%). Berdasarkan data yang dikumpulkan, komite

sekolah SMK menunjukkan berpartisipasi aktif dalam mendukung kegiatan sekolah, khususnya komponen *input* sebagai komponen yang penting dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai pendukung untuk komponen proses merupakan bentuk partisipasi aktif komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. Berbagai bentuk dukungan dilakukan komite sekolah terhadap kegiatan pembelajaran, utamanya pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan bimbingan kerohanian. Dari data yang berhasil dikumpulkan, masih cukup tinggi komite sekolah yang berperan aktif untuk komponen proses, yakni untuk intrakurikulum (70%), ekstrakurikuler (80%), dan bimbingan kerohanian (80%). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen dan perhatian komite sekolah terhadap proses pembelajaran di sekolah menengah kejuruan masih cukup tinggi.

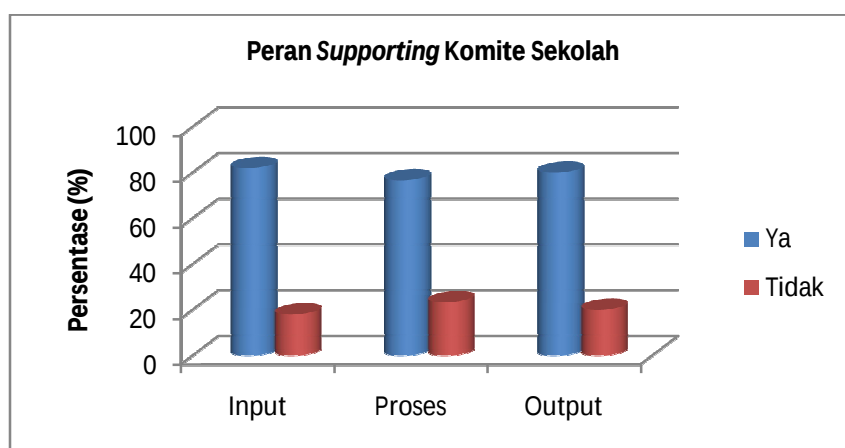
Peran sebagai pendukung terhadap komponen output merupakan bentuk partisipasi aktif komite sekolah terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah. Jumlah komite sekolah yang mendukung komponen *output* cukup tinggi, yakni prestasi akademik (80%) dan prestasi nonakademik (80%).

Peran *Controlling* Komite Sekolah

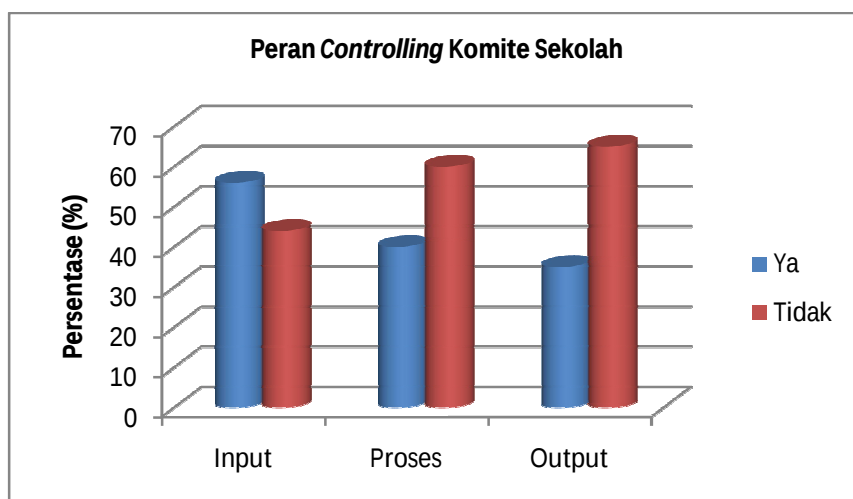
Pengawasan (*controlling*) terhadap penyelenggaraan sekolah merupakan tugas dan peran yang mendasar bagi lembaga mitra sekolah seperti komite sekolah. Rerata peran *controlling* komite sekolah terhadap komponen sistem ditunjukkan pada Gambar 4. Pengawasan terhadap komponen input menunjukkan komitmen yang tidak terlalu tinggi, bahkan untuk beberapa komponen input tidak cukup banyak komite sekolah yang melakukannya. Pengawasan terhadap pengembangan kurikulum di sekolah dilakukan oleh lebih dari separuh sekolah (60%), bahkan pengawasan untuk pengembangan sumberdaya manusia di sekolah dan program kesiswaan kurang dari separuh (40%). Untuk peran pengawasan terhadap sarana dan prasarana sekolah masih menunjukkan proporsi yang cukup tinggi (70%), demikian pula untuk ke-

uangan sekolah (70%). Bentuk pengawasan terhadap keuangan sekolah terbatas pada hal-hal yang sifatnya perencanaan, seperti penyusunan Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan pelaksanaan kegiatan yang pelaksanaannya melibatkan komite sekolah.

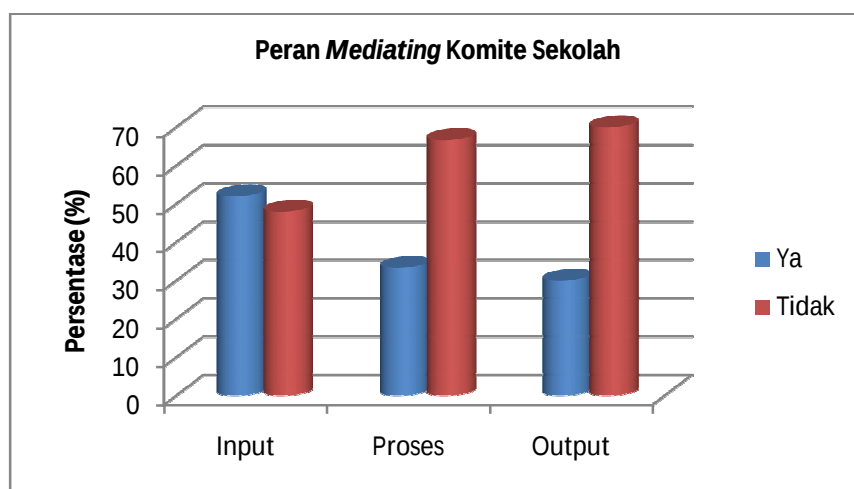
Komite Sekolah seyogyanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan mutu dan hasil belajar siswa. Berdasarkan data yang dikumpulkan, peran pengawasan terhadap pelaksanaan intra kurikuler hanya dilakukan oleh kurang dari separuh komite sekolah (30%). Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan ekstra kurikuler, sedikit peran komite sekolah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekstra kurikuler (40%). Sementara untuk bimbingan ke-rohanian, terdapat separuh komite sekolah yang melakukan pengawasan (50%).



Gambar 3. Peran *Supporting* Komite Sekolah SMK terhadap Komponen Sistem



Gambar 4. Peran *Controlling* Komite Sekolah SMK terhadap Komponen Sistem



Gambar 5. Peran *Mediating* Komite Sekolah SMK terhadap Komponen Sistem

Peran komite sekolah melakukan pengawasan yang dilakukan untuk semua komponen pendidikan secara seimbang, namun dari data yang dikumpulkan kurang dari separuh komite sekolah menyatakan melakukan pengawasan terhadap komponen *output*. Berdasarkan data yang dikumpulkan, kurang dari separuh komite sekolah SMK melakukan pengawasan terhadap prestasi akademik sekolah (40%), sedangkan untuk peran pengawasan terhadap prestasi non-akademik, hanya dilakukan oleh 30% komite sekolah SMK.

Peran *Mediating* Komite Sekolah

Peran sebagai penghubung (*mediator*) antara sekolah dengan masyarakat, termasuk pemerintah dan dunia usaha/dunia industri merupakan peran yang sangat vital bagi pendidikan kejuruan. Rerata peran *mediating* komite sekolah terhadap komponen sistem ditunjukkan pada Gambar 5. Misi utama pendidikan kejuruan adalah menyiapkan siswa untuk terjun ke dunia kerja dan bekerja sebagai tenaga yang terampil untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor dan menjadi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Komite sekolah diharapkan mampu untuk menjembatani antara kepentingan sekolah menengah kejuruan dan dunia usaha/dunia industri.

Berdasarkan data komite sekolah yang dikumpulkan diperoleh gambaran bahwa lebih dari separuh komite sekolah menjalankan peran

sebagai mediator bagi komponen kurikulum sekolah (70%). Sementara itu, hanya separuh peran komite sekolah yang berperan menjembatani kepentingan pengembangan sumberdaya manusia (50%). Kurang dari separuh komite sekolah melakukan mediasi untuk peningkatan program kesiswaan (40%). Demikian pula tidak banyak komite sekolah yang berperan sebagai mediator untuk komponen sarana dan prasarana sekolah (40%), sedangkan untuk peran mediasi untuk keuangan sekolah, masih di atas separuh komite sekolah yang membantu melakukan mediasi terhadap keuangan sekolah (60%).

Peran mediasi komite sekolah untuk komponen proses merupakan bentuk dukungan nyata bagi sekolah agar dapat meningkatkan mutu pendidikannya. Dari data yang dikumpulkan, sama halnya untuk komponen *input*, ternyata tidak banyak sekolah melakukan peran mediasi untuk komponen proses. Kurang dari separuh komite sekolah melakukan mediasi untuk mendukung komponen pembelajaran (30%). Demikian pula untuk komponen ekstrakurikuler atau kegiatan yang berkaitan dengan minat dan bakat siswa, kurang dari separuh komite sekolah yang mendukung untuk melakukan mediasi antara sekolah dengan masyarakat, termasuk dunia usaha dan dunia industri (30%). Hal itu juga terjadi pada dukungan dan peran komite sekolah untuk komponen bimbingan ke-rohanian, kurang dari separuh komite sekolah melakukan mediasi untuk membantu dalam kegiatan tersebut (40%).

Peran mediasi Komite Sekolah terhadap komponen *output* dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, diantaranya melakukan mediasi dengan pihak-pihak di luar sekolah, termasuk dunia usaha dan dunia industri untuk mendorong siswa memiliki prestasi akademik dan nonakademik yang lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, dari data yang berhasil dikumpulkan kurang dari separuh komite sekolah yang melakukan mediasi untuk mendukung prestasi akademik (30%). Sama dengan peran mediasi untuk prestasi akademik, peran mediasi untuk prestasi nonakademik juga hanya dilakukan oleh kurang dari separuh komite sekolah SMK di wilayah Jakarta (30%).

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian serta informasi terkait dengan Komite Sekolah lainnya, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Setelah lebih dari sepuluh tahun terbitnya kebijakan terkait dengan komite sekolah, yakni sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, keberadaan komite sekolah di sebagian besar SMK masih berjalan aktif sebagai mitra dan pendamping sekolah dalam mewujudkan capaian peningkatan mutu pendidikan. Sebagian kecil sekolah mengatakan bahwa komite sekolah tidak aktif karena pemerintah DKI Jakarta telah memberikan berbagai fasilitas dan keperluan sekolah sehingga tidak ada alasan dan tidak dibenarkan sekolah untuk meminta dana dengan bentuk apapun kepada orang tua siswa.
- Komite Sekolah sebagai bentuk wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat di lingkungan sekolah, terutama dalam pembuatan kebijakan dan program sekolah, telah dilakukan oleh sebagian SMK. Peran komite sekolah dalam memberikan berbagai pertimbangan (*advisory*) dalam pembuatan kebijakan dilaksanakan sekolah, terutama kebijakan terkait dengan komponen input

dalam sistem persekolahan, seperti penyusunan kurikulum, pengembangan sumberdaya manusia (guru dan karyawan), program yang terkait dengan kesiswaan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah.

- Peran komite sekolah sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah (*supporting*) dilakukan dalam bentuk dukungan finansial, bantuan pemikiran atau gagasan, maupun tenaga atau keahlian. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah DKI Jakarta, bentuk dukungan finansial terhadap program akademik di sekolah mulai ditinggalkan oleh sebagian besar SMK dan digantikan menjadi dukungan dalam bentuk gagasan/pemikiran atau bentuk tenaga dan keahlian yang lebih sesuai.
- Peran komite sekolah terkait dengan pengawasan penyelenggaraan sekolah terhadap komponen sistem (*input*, proses, *output*) kurang optimal, terutama pada komponen proses dan *output* sekolah. Kurang dari separuh SMK yang masih menunjukkan komitmen terkait peran pengawasan (*controlling*) terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Untuk itu, peran pengawasan ini perlu ditingkatkan untuk dapat menjamin bahwa SMK dapat menyelenggarakan pendidikan dengan prinsip transparan, akuntabel dan memiliki komitmen tinggi terhadap pencapaian mutu yang tinggi.
- Peran sebagai mediator belum terlaksana secara optimal. Sebagian SMK telah melakukan mediasi antara sekolah dan masyarakat serta dunia usaha dan industri. Namun demikian, karena tujuan pendidikan kejuruan adalah menyiapkan siswa untuk dapat bekerja di tengah masyarakat, maka diperlukan komitmen dan kapasitas komite sekolah yang mumpuni untuk menjembatani sekolah dan dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolam, Raymond. 1993. "School-Based Management, School Improvement and School Effectiveness", dalam Dimmock, Clive (ed), *School-Based Management and*

- School Effectiveness*. New York: Routledge. Hlm. 219-234.
- Depdiknas, Ditjen Dikdasmen, Dit. Dikmenum. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)*.
- Depdiknas, Ditjen Dikdasmen, Dit. Dikmenum. 2002. *Penyelenggaraan School Reform dalam Konteks MPMBS di SMU*.
- Depdiknas, Ditjen Dikdasmen. 2003. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Lestari, Siti. 2012. "Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Pendidikan". *Prosidings Seminar Nasional Ditjen Dikti*, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Semiawan, Conny R. 2007. *Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Kencana
- Sumarno, dkk. 2013. "Asesmen Kebutuhan Penerapan Manajemen Berbasis Pengetahuan dalam Pembangunan Pendidikan Daerah", dalam *Cakrawala Pendidikan*, XXXII (2), hlm.220-230.
- Undang-undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.